PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik
Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 13 Nomor 4, 2026

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA LOKAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Abdul Rachman Saida[1], Istiqamah Bungana[2], Fitria Nugrah Madani[3], I Wayan Supadiyasa[4], Hardiyanto[5]
[134]Universitas Tompotika Luwuk
[25]Universitas Negeri Gorontalo
rahmansaida23@gmail.com[1], istiqamahbungana2001@gmail.com[2], madanifn@ung.ac.id[3], Supadiyasa045@gmail.com[4], hardiyanto@ung.ac.id[5]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai penerapan Peraturan Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja lokal. Sebagai daerah kepulauan dan terpencil yang memiliki potensi sumber daya alam serta terus berkembang, perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal menjadi aspek penting untuk mencegah marginalisasi ekonomi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan publik. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Dinas Ketenagakerjaan, pelaku usaha, pengurus serikat pekerja, serta kajian terhadap dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketenagakerjaan telah berjalan, namun belum optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran pengawasan, ketidaksesuaian kompetensi lulusan pendidikan lokal dengan kebutuhan pasar kerja, serta lemahnya penegakan sanksi terhadap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan kuota tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, serta pengembangan sistem informasi pasar kerja yang transparan guna mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja lokal dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan.

Kata Kunci**: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Ketenagakerjaan, Kesejahteraan Pekerja Lokal, Banggai Kepulauan**

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the Regional Regulation of Banggai Kepulauan Regency concerning labor administration in improving the welfare of local workers. As an archipelagic region with continuously developing natural resource potential, the protection and empowerment of local workers are essential to preventing economic marginalization. This research employed a descriptive qualitative method using a public policy study approach. Data were collected through in-depth interviews with the Department of Manpower, business actors, labor union representatives, and a review of relevant legal documents. The findings indicate that the implementation of the labor policy has been carried out but has not yet reached its full potential due to several challenges, including limited funding for labor supervision, a mismatch between the competencies of local graduates and labor market demands, and weak enforcement

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2008-1894 (Offline)
ISSN: 2715-9671 (Online)

of sanctions against companies that fail to comply with local employment quota regulations. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing competency-based training programs, and developing a transparent local labor market information system are necessary to improve the welfare of local workers and the effectiveness of labor policy implementation.
*Keywords**: Policy Implementation, Regional Regulation, Employment, Local Worker Welfare, Banggai Kepulauan.***

PENDAHULUAN

Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai karakteristik geografis kepulauan dengan potensi kekayaan alam yang melimpah pada sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan pariwisata. Perkembangan pembangunan daerah dan masuknya beragam investasi industri berskala kecil hingga menengah menuntut kesiapan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan domestik agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Dinamika sosial ekonomi masyarakat kepulauan ini membutuhkan intervensi kebijakan publik yang integratif agar investasi modal asing maupun domestik mampu diserap secara terbaik oleh asal daya manusia lokal. Gejala ini sejalan dengan pandangan dasar bahwa setiap tindakan regulatif negara atau daerah harus diarahkan untuk menciptakan stabilitas dan distribusi keadilan bagi warga lokal secara berkelanjutan (Aurelia, 2025).

Penyelenggaraan ketenagakerjaan di tingkat daerah menjadi pilar utama perlindungan hak ekonomi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi nasional yang dijabarkan ke dalam otonomi daerah. Kehadiran regulasi lokal berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan diharapkan mampu menjadi instrumen hukum positif yang menjamin penyerapan tenaga kerja lokal, standarisasi upah minimum, keselamatan kerja, serta peningkatan keterampilan teknis. Namun, kesenjangan antara teks kebijakan (policy text) dan realitas di lapangan (policy practices) sering kali menjadi persoalan akut dalam tata pamong pemerintahan daerah. Masalah kesenjangan ini membuktikan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum tidak semata-mata terletak pada kualitas legislasi, melainkan pada bagaimana struktur birokrasi menggerakkan instrumen pengawasan di lapangan (Karlina et al., 2025).

Kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan masih terjebak pada kondisi rendahnya daya saing karena terbatasnya akses terhadap sertifikasi profesi serta kurangnya sarana pelatihan kerja yang memadai.Banyak perusahaan swasta yang beroperasi di kawasan kepulauan ini lebih memilih untuk membawa pekerja dari luar daerah dengan alasan memiliki kualifikasi yang lebih unggul, yang pada gilirannya memicu kecemburuan sosial dan meningkatkan angka pengangguran di daerah pedesaan.Situasi keterasingan ekonomi ini menciptakan distorsi dalam pasar kerja lokal

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

yang, jika tidak ditangani melalui intervensi hukum, dapat merusak solidaritas sosial di kalangan masyarakat adat.Hal ini menguatkan argumen akademis bahwa ketidakseimbangan dalam akses pasar akibat informasi yang tidak merata memerlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaiki kegagalan pasar tersebut (Alif et al., 2024).

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah mengeluarkan Peraturan Daerah yang khusus bertujuan untuk mengatur penempatan, pelatihan, perlindungan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja lokal dengan cara yang sistematis.Kebijakan ini diharapkan mampu menjadikan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai agen yang aktif dalam melakukan pengawasan, menyelesaikan sengketa industri, dan memfasilitasi kerjasama antara sektor usaha dan lembaga pendidikan vokasi.Keberadaan peraturan ini secara konseptual dianggap sebagai alat yang menghubungkan kepentingan akumulasi modal kapitalis dengan hak-hak dasar para pekerja. Hubungan yang melibatkan tiga pihak ini membutuhkan regulasi formal yang solid agar interaksi antara para pelaku tetap seimbang tanpa merugikan pihak yang lebih lemah (Ningrum, 2025).

Berdasarkan pengamatan, efektivitas pelaksanaan Perda Ketenagakerjaan di wilayah kepulauan sering kali terhambat oleh faktor-faktor geografi, rendahnya infrastruktur komunikasi, serta keterbatasan jumlah dan kualitas pengawas ketenagakerjaan.Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di pulau-pulau terpencil sukar untuk dijangkau secara teratur, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran hak-hak pekerja seperti pembayaran upah yang lebih rendah dari standar minimum, jam kerja yang berlebihan, dan ketiadaan perlindungan sosial.Kompleksitas terkait sosiologis dan geografi ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum di daerah sangat tergantung pada kemampuan birokrasi lokal untuk menyesuaikan strategi implementasi yang dipilih (Syawalludin et al., 2025).

Oleh karena itu, investigasi mendalam tentang pelaksanaan peraturan daerah terkait ketenagakerjaan di Banggai Kepulauan sangat penting untuk meneliti elemen-elemen yang menghambat, mendukung, serta dampak langsungnya terhadap kesejahteraan keluarga pekerja setempat.Hasil dari analisis ini diharapkan mampu memberikan saran strategis yang berbasis data kepada para pengambil keputusan di kawasan tersebut untuk merumuskan kembali sistem pengawasan dan kolaborasi dalam ketenagakerjaan.Pentingnya studi ini didasari oleh pemahaman ilmiah bahwa evaluasi kebijakan yang dilakukan secara rutin merupakan alat kunci untuk menilai kinerja institusi dalam mencapai kesejahteraan publik (Fahmi, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengulas secara rinci fenomena pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

Ketenagakerjaan di Kabupaten Banggai Kepulauan.Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin memahami realitas sosiologis, proses negosiasi kekuasaan, serta hambatan institusional yang dihadapi para pelaksana kebijakan dan pekerja lokal di lapangan.Metode ini diambil berdasarkan paradigma interpretatif yang berpendapat bahwa realitas sosial bersifat kompleks, terus berubah, dan mengandung makna yang tersembunyi yang perlu dieksplorasi secara menyeluruh oleh peneliti sebagai alat utama(Creswell & Creswell, 2017).

Pengumpulan data berfokus pada kawasan Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan sasaran institusi pemerintah yang relevan, area operasional perusahaan perkebunan, tambang batu, sektor perikanan komersial, serta pusat usaha mikro, kecil, dan menengah.Pemilihan informan dilakukan dengan cara sengaja (purposive sampling) agar dapat memperoleh informasi yang sahih dari individu-individu berkompeten, termasuk Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Bidang Hubungan Industrial, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi yang bertugas di wilayah Banggai, manajer HRD perusahaan swasta, perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) cabang, serta tenaga kerja lokal.Metode pemilihan sampel ini berlandaskan pada konsep keandalan informasi sosiologis di mana informan dipilih berdasarkan pemahaman mereka atas isu tersebut dan posisi mereka dalam struktur kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi antara berbagai sumber dan metode, yang mencakup wawancara mendalam, observasi lapangan mengenai kondisi kerja, serta analisis dokumentasi seperti regulasi, dokumen internal instansi, laporan pengawasan, dan data statistik tentang ketenagakerjaan di daerah.Wawancara berlangsung dengan pedoman semi-terstruktur yang memberi kesempatan kepada informan untuk menjelajaki ide-ide mereka secara terbuka namun tetap berfokus pada inti permasalahan.Untuk memastikan kevalidan data, dilakukan observasi yang diperpanjang dan diskusi dengan rekan-rekan untuk mengurangi kemungkinan bias subjektif peneliti dalam menganalisis data tentang ketenagakerjaan wilayah tersebut(Zahra et al., 2026).

Analisis data dilakukan secara dinamis berdasarkan model analisis data kualitatif yang mencakup langkah-langkah reduksi data seperti pemilihan, konsentrasi, penyederhanaan, dan transformasi data awal.Data disajikan dalam bentuk narasi yang logis dan tabel matriks, diikuti dengan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Semua data yang telah dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel yang terkait dengan implementasi kebijakan, termasuk komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur administratif, lalu dibandingkan dengan teori-teori tentang kesejahteraan pekerja serta kebijakan publik.Kerangka analisis ini memerlukan integrasi yang harmonis antara temuan empiris dan pemahaman teoretis untuk menghasilkan penjelasan yang mendalam dan berbasis ilmiah(Kusumah et al., 2026).

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan merupakan bagian dari implementasi kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Implementasi kebijakan tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan suatu peraturan, tetapi juga sebagai proses yang memastikan tujuan kebijakan dapat diwujudkan melalui komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta koordinasi antarorganisasi yang terlibat. Menurut Hardiyanto, Mahmud, dan Makku (2023), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun komunikasi yang baik, menyediakan sumber daya yang memadai, memperkuat komitmen aparatur, serta menciptakan struktur birokrasi yang mampu menjalankan kebijakan secara konsisten. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan(Hardiyanto. Mahmud et al., 2023).

Lebih lanjut, Hardiyanto dkk. (2025) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan memerlukan koordinasi yang efektif antarinstansi, ketepatan proses pendataan dan verifikasi, pengawasan yang berkesinambungan, serta evaluasi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan pemerintah mengidentifikasi berbagai hambatan implementasi sekaligus menyusun langkah perbaikan sehingga tujuan kebijakan tetap dapat tercapai. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus dipandang sebagai proses yang dinamis dan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat(Hardiyanto et al., 2025).

Dalam konteks pelayanan publik, Sri Lestari dkk (2026) menyatakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur, pengalaman kerja, komunikasi internal yang baik, serta inovasi pelayanan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi pegawai, gangguan teknis, dan lemahnya dukungan organisasi menjadi faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi, dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan pelayanan(Lestari et al., 2026).

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan perlu dipahami sebagai proses yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan tenaga kerja dalam mewujudkan tujuan kebijakan. Keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari terlaksananya program kerja atau kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Daerah, tetapi

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

juga dari kemampuan pemerintah membangun koordinasi yang efektif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sistem pengawasan, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, efektivitas implementasi Peraturan Daerah diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, serta mendorong terciptanya kesejahteraan tenaga kerja yang berkelanjutan.

Analisis Kondisi Objektif Ketenagakerjaan di Banggai Kepulauan

Kondisi tenaga kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan secara keseluruhan mencerminkan ciri khas wilayah kepulauan yang berkembang dengan ekonomi utama bertumpu pada sektor domestik tradisional.Ketersediaan pekerjaan dalam sektor formal masih sangat minim, terutama didominasi oleh proyek konstruksi infrastruktur lokal, industri pengolahan hasil laut skala kecil, ditambah sektor perkebunan kelapa sawit dan industri ekstraktif batuan di beberapa wilayah kecamatan(Bidullah, 2022).Struktur ketenagakerjaan yang tidak seimbang ini memerlukan intervensi pemerintah daerah yang adaptif untuk mengharmonisasikan antara pasokan tenaga kerja lokal dan permintaan industri yang selalu berubah.Sesuai dengan data sosiologis, struktur pasar kerja semacam ini sangat rentan terhadap guncangan eksternal jika tidak didukung oleh regulasi perlindungan lokal yang kuat.

Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagian besar dikuasai oleh lulusan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Dasar, sementara angka lulusan pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) masih sangat rendah di area pedesaan.Tingkat pendidikan formal yang rendah ini memiliki hubungan langsung dengan minimnya kepemilikan sertifikasi kompetensi profesi yang disahkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang berdampak pada keterbatasan akses bagi pekerja lokal untuk menduduki posisi strategis seperti supervisor, insinyur, atau manajer di perusahaan swasta berskala nasional yang beroperasi di daerah.Terbatasnya modal manusia ini menjadikan masyarakat lokal berada dalam posisi tawar yang sangat lemah di hadapan pemilik modal kapitalis.

Berikut disajikan data ringkas mengenai komposisi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan sektor industri utama pada tahun 2024-2025:

1. Tabel Komposisi Angkatan Kerja Dan Penyerapan Tenaga Kerja

No	Sektor Industri Utama	Jumlah Pekerja Lokal (Orang)	Jumlah Pekerja Luar (Orang)	Rata-rata Upah Bulanan (Rp)	Status Kepatuhan Perda

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

	Perikanan & Kelautan	4.520	120	2.600.000	Cukup Patuh
	Perkebunan & Pertanian	3.150	450	2.900.000	Kurang Patuh
	Pertambangan Batuan & Galian C	840	210	3.200.000	Rendah
	Konstruksi & Infrastruktur	1.890	320	3.000.000	Cukup Patuh
	Jasa, Perdagangan & Pariwisata	2.410	90	2.450.000	Kurang Patuh

Data yang disajikan menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan pada perusahaan swasta dalam menerapkan Peraturan Daerah Ketenagakerjaan, terutama mengenai kewajiban untuk mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal minimal 70-80% untuk posisi non-spesialis.Sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit tercatat sebagai yang paling sering mengandalkan pekerja operasional dari luar daerah dengan alasan terkait disiplin kerja dan pengalaman teknis.Situasi ini menimbulkan ketidakselarasan sosial dan ekonomi di mana masyarakat lokal hanya berperan sebagai penonton atau pekerja harian dengan pendapatan rendah dan tanpa kepastian akan jaminan sosial yang memadai.Kondisi ekonomi yang terpinggirkan ini memperkuat argumen bahwa pasar yang dibiarkan berjalan bebas tanpa pengawasan yang ketat cenderung menguntungkan pemilik modal besar (Prestianawati et al., 2025).

Proses Implementasi Kebijakan Perda Ketenagakerjaan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mengenai Ketenagakerjaan secara administratif dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai sektor utama.Penyampaian regulasi telah dilakukan kepada manajemen perusahaan, pemimpin masyarakat, dan serikat pekerja lokal melalui forum tripartit secara berkala.Namun, efektivitas komunikasi kebijakan ini terhalang oleh luasnya wilayah geografis kepulauan yang memisahkan pulau-pulau kecil, sehingga penyebaran informasi mengenai hukum tidak merata hingga

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

ke unit usaha di daerah terpencil.Kegagalan dalam mendistribusikan informasi yang merata ini berdampak pada rendahnya kesadaran hukum dari pihak-pihak yang ditujukan oleh kebijakan (Tumanggor & Sazali, 2025).

Dalam hal ketersediaan sumber daya, Dinas Ketenagakerjaan menghadapi masalah signifikan terkait dengan pembatasan anggaran untuk operasional pengawasan dan jumlah Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki pelatihan keahlian dalam penyidikan yang terbatas.Sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, tanggung jawab pengawasan ketenagakerjaan telah dipindahkan ke pemerintah provinsi, sehingga membatasi kewenangan tindakan langsung dari dinas kabupaten.Hal ini menyebabkan kekosongan dalam pengawasan di lapangan, karena pengawas provinsi berada jauh di ibu kota provinsi dan jarang melakukan inspeksi mendadak di kepulauan Banggai.Ketiadaan alat pengawasan yang melekat ini melemahkan kekuatan dari peraturan daerah yang telah dirumuskan dengan biaya yang tinggi (ERMAN, 2025).

Disposisi atau dedikasi dari para pelaksana kebijakan di tingkat teknis menunjukkan niat yang baik, tetapi sering kali mendapati diri tertekan oleh kepentingan politik lokal atau investasi daerah.Pemerintah daerah sering kali menghadapi keputusan sulit antara menerapkan regulasi ketenagakerjaan secara ketat (seperti menerapkan sanksi pencabutan izin usaha) atau melonggarkannya untuk menjaga iklim investasi agar para investor tetap bertahan di Banggai Kepulauan.Pendekatan akomodatif birokrasi terhadap para investor ini mengorbankan hak-hak perlindungan buruh lokal yang seharusnya dilindungi.Kondisi kompromistis dalam birokrasi ini menekankan kebenaran teori ekonomi politik bahwa negara sering berperan sebagai pendorong kepentingan kelas kapitalis (Nurjaman, 2020).

Struktur birokrasi yang menangani masalah ketenagakerjaan di Banggai Kepulauan belum dilengkapi dengan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang terintegrasi berbasis digital (e-government) untuk pelaporan lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja lokal.Perusahaan swasta masih melakukan proses rekrutmen secara tertutup, tanpa memberikan laporan transparan mengenai formasi yang tersedia kepada Dinas Ketenagakerjaan.Hal ini menghalangi kesempatan pencari kerja lokal untuk bersaing secara adil. Keterbatasan akses informasi ini bertentangan dengan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memperburuk praktik nepotisme di kalangan oknum internal.Sistem birokrasi yang tertutup dan kaku terbukti menghambat efektivitas pelayanan publik serta perlindungan hak masyarakat (Wijaya, 2025).

Dampak Kebijakan Terhadap Kesejahteraan Pekerja Lokal

Dampak dari penerapan Perda Ketenagakerjaan pada kesejahteraan keluarga pekerja lokal di Banggai Kepulauan dianggap masih belum terlihat nyata serta tidak

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

merata di berbagai sektor industri.Upah minimum kabupaten yang ditentukan sering kali tidak diindahkan oleh pengusaha mikro dan menengah, dengan alasan keterbatasan finansial perusahaan yang belum pulih setelah pandemi.Akibatnya, kemampuan beli pekerja lokal masih rendah di tengah peningkatan harga barang kebutuhan pokok di pulau yang sangat bergantung pada pengiriman dari luar.Situasi gaji rendah ini memperkuat siklus kemiskinan di kalangan tenaga kerja kasar di daerah tersebut (Aulia, n.d.).

Aspek perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, serta partisipasi dalam jaminan sosial ketenagakerjaan juga masih dalam kondisi yang memprihatinkan, terutama di sektor pertambangan galian C dan pekerja harian di perkebunan.Banyak dari pekerja lokal yang tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri yang memenuhi standar dan tidak memiliki perlindungan kecelakaan kerja yang cukup dari perusahaan.Pengabaian terhadap pemenuhan hak-hak normatif ini menempatkan pekerja dalam situasi risiko sosial ekonomi yang tinggi jika terjadi kecelakaan yang serius.Ketidakpedulian terhadap aspek keselamatan kerja ini mencerminkan hilangnya peran negara sebagai penjaga hak hidup warga negaranya (SHABRINA, 2025).

Meskipun begitu, hanya ada dampak positif kecil yang dirasakan oleh industri perikanan komersial, di mana penerapan Perda berhasil memfasilitasi kolaborasi antara perusahaan pengolahan ikan dan kelompok nelayan lokal melalui program pemberdayaan teknologi.Nelayan setempat diberikan pelatihan untuk mengolah hasil tangkapan sesuai standar ekspor, sehingga mereka bisa meningkatkan nilai produk dan pendapatan bulanan secara mandiri.Keberhasilan yang terbatas ini menunjukkan bahwa kebijakan regulasi, apabila digabung dengan program pemberdayaan berbasis komunitas, dapat memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat bawah (Amelia, 2025).

Secara keseluruhan, indeks kesejahteraan buruh lokal di Kabupaten Banggai Kepulauan masih berada pada posisi yang rendah karena kontribusi pendapatan dari industri formal belum mampu mengubah dominasi kemiskinan struktural di daerah pedesaan. Diperlukan restrukturisasi yang mendalam terhadap kebijakan dan ketegasan sanksi hukum sebagai syarat utama jika pemerintah daerah benar-benar berkomitmen untuk menciptakan keadilan sosial bagi penduduknya.Kesejahteraan tidak akan pernah terwujud selama sistem kebijakan lebih mendukung pengumpulan kekayaan untuk segelintir elite ekonomi (Merdiani & Ruslina, 2025).

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung

Faktor utama yang menghalangi penerapan Perda Ketenagakerjaan di Banggai Kepulauan adalah adanya bentrokan regulasi antara kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan provinsi dalam hal pengawasan di bidang ketenagakerjaan.Pemindahan wewenang pengawasan ke provinsi berdasarkan UU No. 23/2014 menyebabkan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten kehilangan kemampuan untuk menegakkan hukum secara langsung terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar.Ketidakjelasan koordinasi

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

antar pihak pemerintah serta ego sektoral ini mengurangi efektivitas pengelolaan pemerintahan di wilayah kepulauan.

Faktor penghambat berikutnya adalah rendahnya mutu sumber daya manusia lokal serta kurangnya Balai Latihan Kerja (BLK) yang memadai di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memberikan pelatihan keterampilan teknis yang sesuai dengan tuntutan pasar di era modern.Lulusan SMK setempat tidak dibekali keahlian yang sejalan dengan kebutuhan industri ekstraktif dan digital, yang mengakibatkan adanya ketidakselarasan antara pendidikan dan pasar kerja yang sangat mencolok.Sebagai akibatnya, posisi-posisi teknis yang memerlukan keahlian tinggi masih diisi oleh tenaga kerja dari luar, sementara pekerja lokal terjebak pada pekerjaan kasar yang tidak membutuhkan keterampilan.Permasalahan mendasar ini muncul dari kegagalan sektor pendidikan dalam menyesuaikan diri dengan struktur pasar kerja yang sebenarnya.

Di sisi lain, ada elemen pendukung yang berpotensi, yaitu adanya komitmen politik yang solid dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan yang terus menerus memperjuangkan aspirasi persatuan pekerja lokal dalam diskusi resmi.Dukungan dari lembaga legislatif ini memungkinkan pengalokasian anggaran daerah untuk inisiatif pelatihan kerja gratis yang diselenggarakan oleh dinas ketenagakerjaan bekerja sama dengan BLK di luar wilayah. Kerja sama antara fungsi pengawasan legislatif dan gerakan sosial serikat pekerja menjadi aset politik yang berharga untuk mendorong eksekutif agar lebih tegas dalam menegakkan peraturan daerah. Interaksi politik yang aktif antara legislatif dan warga ini adalah prasyarat utama bagi adanya demokrasi yang substansial di tingkat lokal (Yohanes Oci, 2025).

Faktor pendukung tambahan adalah tingginya modal sosial yang tercermin dalam budaya gotong royong dan solidaritas masyarakat adat di Banggai Kepulauan, yang menolak praktik eksploitasi tenaga kerja lokal oleh perusahaan luar secara sewenang-wenang. Ketika terjadi pelanggaran terhadap hak pekerja, lembaga adat dan komunitas lokal dapat memberikan tekanan moral dan melakukan boikot sosial yang efektif untuk mendorong manajemen perusahaan melakukan negosiasi damai dan memenuhi tuntutan pekerja lokal.

Modal sosial yang dibangun di atas kearifan lokal ini berfungsi sebagai hukum tidak resmi yang mengatasi kelemahan sistem hukum formal negara yang cenderung lambat dan birokratis. Kekuatan dari ikatan sosial terbukti mampu menjadi benteng perlindungan bagi komunitas lokal dari penetrasi kapitalisme yang merusak (Erfain, 2025).

SIMPULAN

Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Banggai Kepulauan belum mencapai hasil yang memuaskan dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja lokal secara

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

menyeluruh.Keberhasilan tersebut terhambat oleh masalah struktural seperti pengurangan kewenangan pengawasan oleh peraturan pemerintahan daerah, keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia lokal, dan kurangnya transparansi dalam perekrutan di perusahaan swasta.Sebagian besar pekerja lokal masih terdiam di sektor informal dan posisi yang tidak memerlukan keahlian dengan perlindungan gaji dan jaminan sosial yang sangat minim.Ketidakberhasilan mencapai tujuan dari kebijakan ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kapasitas kelembagaan yang solid dan penegakan sanksi yang tegas, regulasi hanya akan berfungsi sebagai simbol yang tidak berdaya di hadapan kekuatan pasar.

Walaupun demikian, potensi modal sosial dari komunitas adat dan komitmen politik dari legislatif daerah menjadi elemen kunci yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan di masa depan.Keberhasilan yang terbatas dalam sektor kemitraan perikanan menunjukkan bahwa model intervensi kebijakan yang menggabungkan regulasi perlindungan dengan pemberdayaan ekonomi berdasarkan keunggulan lokal dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan para pekerja.Oleh karena itu, diperlukan perubahan strategi pelaksanaan yang berpindah dari pendekatan birokratis-formalistik menjadi pendekatan kolaboratif yang lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Alif, N., Haris, A., & Arifin, S. (2024). *Transformasi Sosial Dan Ekonomi Di Desa Batupute: Implikasi Pembangunan Industri Galangan Kapal*.

Amelia, D. M. (2025). Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Keadilan Sosial Berbasis Komunitas. *Jurnal Kajian Hukum*, *1*(1), 15–23.

Aulia, D. (n.d.). *Manajemen SDM-Perburuhan*.

Aurelia, K. H. (2025). *Analisis Pengaruh Investasi Dan Upah Minimum Terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Di Pulau Jawa Dan Pulau Sumatera Tahun 2018-2023*.

Bidullah, T. (2022). Analisis Sektor Ekonomi Dalam Struktur Perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan: Analysis of the Economic Sector in the Economic Structure of Banggai Islands Regency. *Jurnal Ilmiah Produktif*, *10*(1), 20–26.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.

Erfain, E. (2025). Kekuatan Komunitas Lokal Sebagai Pilar Masyarakat Sipil. *Journal of Humanities, Social Sciences, and Education*, *1*(6), 123–134.

ERMAN, S. (2025). *Pengawasan Produk Hukum Daerah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Yang Baik*.

Fahmi, M. (2025). Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Bisnis*, *1*(1), 1–7.

Hardiyanto. Mahmud, S., Makku, W. D., & Tompotika, F. U. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengolahan Sampah di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu*. *3*, 4847–4862.

Hardiyanto, H., Djohanis, H., Lestari, S., & Supadiyasa, I. W. (2025). EFEKTIVITAS

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)

Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, *12*(4), 1490–1505.

Karlina, I., Setiawan, I., Nurjulianti, N., Adhar, A., & Saleh, A. (2025). Efektivitas Pengawasan Ketenaga Kerjaan Dalam Menjamin Hak-Hak Pekerja Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *3*(04), 1279–1292.

Kusumah, R. M., Rahayu, S., Dwiyanthi, A., Hardiyanto, H., Handayani, D. N., Hendra, A., Sumiati, I., Margaretha, R., Kusmiyati, M., & Akuba, A. M. (2026). *Pengantar Administrasi PubliK*. Penerbit Widina.

Lestari, S., Djohanis, H., Luwuk, U. T., & Gorontalo, U. N. (2026). *Pada Dinas Kependudukan Kabupaten Banggai*. *13*, 87–101.

Merdiani, W., & Ruslina, E. (2025). Peran Hukum dalam Peningkatan Kesejahteraan melalui Ekonomi Berbasis Keadilan: Role of Law in Enhancing Welfare through a Justice-Based Economy. *Res Nullius Law Journal*, *7*(1), 63–72.

Ningrum, M. (2025). Efektivitas kebijakan link and match dalam pendidikan vokasi: Menakar kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, *5*(1), 51–58.

Nurjaman, A. (2020). *Ekonomi Politik Dalam Teori dan Praktek* (Vol. 1). UMMPress.

Prestianawati, S. A., Akmal, A. K., Muhammad Fawwaz, S. E., Viphindrartin, S., Rasli, A., Zainuri, M. S., & Muslih, M. A. H. (2025). *Ekonomi Kelembagaan Dan Implikasinya Pada Pembangunan*. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers.

SHABRINA, D. F. (2025). *Konstitusionalitas Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja*. Universitas Lampung.

Syawalludin, M. F., Pratama, A., Ramadhan, U., & DKK, D. K. K. (2025). *Ekonomi Sumber Daya Manusia: Tenaga Kerja, Pengangguran, dan Tantangan Ketenagakerjaan Modern*. Alfabeta Indonesia.

Tumanggor, T., & Sazali, H. (2025). Etika Regulasi dan Kebijakan Media Digital: Meningkatkan Kesadaran Publik di Era Informasi. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, *6*(3), 1657–1669.

Wijaya, M. (2025). *Birokrasi Pemerintahan*. CV Eureka Media Aksara.

Yohanes Oci, S. I. P. (2025). *Potret Demokrasi Lokal DPRD, Partisipasi Publik, dan Dinamika Hubungan Kekuasaan*. Kreasi Cendekia Pustaka.

Zahra, G., Jaira, A., Nurhasan, R., & Garut, U. (2026). *Workload Terhadap Perilaku Cyberloafing Generasi Z : Peran Mediasi Stres Kerja Pada Karyawan Kota Garut*. *13*, 842–856.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)